

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam mengelola sumber daya dan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu aspek utama dalam tata kelola pemerintahan daerah adalah penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan, pengawasan, serta pertanggungjawaban publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas laporan keuangan pada OPD menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung *good governance* dan pelayanan publik yang optimal (Sasmita, 2021).

Dalam era reformasi birokrasi dan desentralisasi fiskal, tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik semakin meningkat. Pemerintah pusat mendorong seluruh pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, relevansi, dan dapat dibandingkan, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Salah satu inovasi strategis yang diimplementasikan pemerintah untuk mendukung hal tersebut adalah penerapan SIPD. SIPD dirancang sebagai sistem informasi terintegrasi secara nasional yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah.

Menurut Naida dkk., (2024) SIPD dirancang untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan daerah dilakukan secara lebih tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Manfaat SIPD tidak hanya terbatas pada kemudahan pengelolaan data, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, mempercepat proses evaluasi kinerja, serta memudahkan analisis data pembangunan secara nasional dan daerah (Nirmala dkk., 2023). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Penerapan SIPD menjadi kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah juga disebutkan bahwa Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah dikelola dalam satu data melalui Sistem Informasi Pemerintahan daerah (SIPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di tingkat daerah, Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar telah melakukan migrasi penuh ke SIPD sejak tahun 2024. Dimana pada tahun 2022 dan 2023, pemerintah daerah masih menggunakan sistem ganda yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya hanya mengandalkan SIMDA saja. SIMDA memiliki sejumlah kekurangan, terutama karena belum mengatur integrasi sistem yang menyatukan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terpadu (Tumija dkk., 2023). Secara formal, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 13 tahun berturut-turut sejak tahun 2012. Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan regulasi.

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penerapan SIPD belum sepenuhnya berjalan optimal di lingkungan OPD. Berbagai kendala masih dihadapi, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dalam pengoperasian SIPD tersebut, kesalahan input data, keterlambatan pelaporan, serta lemahnya pengawasan internal. Kondisi ini menyebabkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh OPD belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ideal. Dengan demikian, opini WTP yang telah diraih tidak serta-merta menunjukkan kualitas laporan keuangan OPD yang optimal.

Hasil penelitian terdahulu secara umum menunjukkan bahwa penerapan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Azhar dkk., (2022) membuktikan bahwa kompetensi pengguna, teknologi informasi, dan implementasi SIPD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Langsa. Temuan tersebut diperkuat oleh Paat dkk., (2023) yang menyatakan bahwa penerapan SIPD meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Cimahi melalui proses administrasi yang lebih tertata dan penyajian

laporan yang lebih tepat waktu. Selanjutnya, Fitriasaki (2024) serta Mustaqmah dan Putri (2024) juga menemukan bahwa penerapan SIPD dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, meskipun SIMDA tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Penelitian terbaru oleh Timang dkk., (2025) dan Soekardi dkk., (2025) semakin menegaskan bahwa penerapan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada berbagai OPD di pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil terkait pengaruh penerapan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Akbar dan Mar'aini (2020) menemukan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat berpengaruh tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan melalui keberhasilan implementasi sistem. Sementara itu, Athallah (2023) serta Wahyudi dkk., (2024) menyatakan bahwa penerapan SIPD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan belum berjalan secara optimal. Selanjutnya, Lumuly dkk. (2024) juga menemukan bahwa implementasi SIPD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya research gap, sekaligus menegaskan perlunya penelitian lanjutan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu oleh Azhar dkk., (2022), Paat dkk., (2023), Fitriasaki (2024), Mustaqmah dan Putri (2024), Timang dkk., (2025), serta Soekardi dkk., (2025), yang memiliki persamaan pada variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan, namun

berbeda pada variabel independen, teori yang digunakan, metode penelitian, teknik analisis data, lokasi, dan subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga mengembangkan temuan Akbar dan Mar'aini (2020), Athallah (2023), Lumuly dkk., (2024) serta Wahyudi dkk., (2024) dengan perbedaan bahwa penelitian terdahulu menggunakan sistem lama, sedangkan penelitian ini meneliti penerapan SIPD. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan Teori Technology Acceptance Model (TAM) untuk mengkaji penerapan SIPD berdasarkan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), sikap terhadap penggunaan (*attitude toward use*), dan niat perilaku penggunaan (*behavioral intention to use*) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Tanah Datar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- a. Apakah persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) SIPD berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Tanah Datar?
- b. Apakah persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) SIPD berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Tanah Datar?

- c. Apakah sikap terhadap penggunaan (*attitude toward use*) SIPD berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Tanah Datar?
- d. Apakah niat perilaku penggunaan (*behavioral intention to use*) SIPD berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui bahwa persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) SIPD memengaruhi peningkatan kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Tanah Datar;
- b. Untuk mengetahui bahwa persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) SIPD memengaruhi peningkatan kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Tanah Datar;
- c. Untuk mengetahui bahwa sikap terhadap penggunaan (*attitude toward use*) SIPD memengaruhi peningkatan kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Tanah Datar;
- d. Untuk mengetahui bahwa Niat perilaku penggunaan (*behavioral intention to use*) SIPD memengaruhi peningkatan kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti : manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman peneliti secara mendalam mengenai penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah, dan keterkaitannya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana pengembangan kemampuan dalam menerapkan teori ke dalam praktik nyata, khususnya dalam menganalisis fenomena administrasi publik dan sistem informasi akuntansi pemerintahan.
- b. Bagi Peneliti Lain : manfaat dari penelitian ini bagi peneliti lain adalah menjadi referensi atau dasar untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan SIPD dan kualitas laporan keuangan.
- c. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD): manfaat dari penelitian ini bagi OPD di Kabupaten Tanah adalah sebagai berikut:
 - Memberikan rekomendasi konkret terkait pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan;
 - Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - Memfasilitasi akses yang lebih cepat dan mudah terhadap data keuangan yang terintegrasi dari berbagai sumber di setiap unit kerja;

- Menyadarkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pengelolaan keuangan, yang mengarah pada pengelolaan anggaran yang lebih baik dan lebih profesional;
- Menunjukkan kinerja yang lebih optimal dan akuntabel melalui laporan keuangan yang lebih baik dan lebih rinci di lingkungan OPD, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang definisi variabel penelitian, dimensi pembentuk variabel, faktor yang mempengaruhi variabel (d disesuaikan dengan jenis penelitian dan teori tentang variabel), penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis penelitian, jenis data penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian serta prosedur pelaksanaan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran partisipan, hasil penelitian dan pembahasan (Penelitian Kuantitatif)

BAB V KESIMPULAN & SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk kedepannya dari hasil penelitian